

Pengaruh Kekayaan Daerah dan Belanja Daerah terhadap Pengungkapan *Internet Financial Reporting* (IFR) pada Pemerintah Daerah

Widya Putri^{1*}, Mia Angelina Setiawan²

^{1,2} Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

*Korespondensi: widyaputri@gmail.com

Abstract

This study is a quantitative study that aims to obtain empirical evidence regarding the influence of regional wealth and regional expenditure on the disclosure of Internet Financial Reporting (IFR) in local governments. The population in this study is the district/city government in West Sumatra Province for the period 2018-2020 for 3 years. This study uses purposive sampling method in selecting the sample, with a sample size of 19 districts/cities in West Sumatra Province. The type of data in this study is secondary data obtained from BPK. Analysis of the data used is multiple regression analysis. The results of this study indicate that regional wealth has no effect on IFR disclosure, and regional expenditures have a negative and significant effect on IFR disclosure.

Keywords : *Disclosure of Internet Financial Reporting; Regional Wealth; Regional Shopping.*

How to cite (APA 6th style)

Putri, W & Setiawan, M.A. (2022). Pengaruh Kekayaan Daerah dan Belanja Daerah terhadap Pengungkapan Internet Financial Reporting (IFR) pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 4 (2), 438-448.

PENDAHULUAN

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin kebebasan akses di setiap orang untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah. Salah satu bentuk transparansi pemerintah kepada masyarakat yaitu dengan adanya keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi-informasi publik. Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah salah satu indikator utama yang ditekankan pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 ayat 3 menyatakan bahwa setiap informasi publik harus bisa didapatkan oleh pihak yang berkepentingan dengan cara yang cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Salah satu penyajian informasi terkait dengan pengungkapan laporan keuangan daerah yang mudah dijangkau dan menghemat biaya adalah melalui internet

Pengungkapan pelaporan keuangan melalui internet atau disebut dengan *Internet Financial Reporting* (IFR) merupakan sebuah pengungkapan yang dinilai lebih efisien dan efektif dalam meningkatkan pengendalian terhadap perangkat pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. *Internet Financial Reporting* (IFR) dapat mempermudah pemerintah daerah dalam mengatasi dan menekan biaya

monitoring karena penggunaannya yang cepat dan mudah diakses bagi masyarakat (Masra, 2020).

Fenomena pengungkapan *Internet Financial Reporting* (IFR) ini terjadi di pemerintah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat, dimana belum semuanya pemerintah daerah berpartisipasi dalam bertindak transparansi terhadap informasi laporan keuangan di pemerintah daerahnya, dan pemerintah daerah masih belum sepenuhnya menggunakan konten Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah di *website* resminya untuk mempublikasikan secara utuh dan konsisten laporan keuangan setiap tahunnya. Berdasarkan data yang diolah tahun 2021, 19 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, ditemukan 14 kabupaten/kota sudah mempublikasikan laporan terkait informasi keuangannya, dan dari 14 pemerintah kabupaten/kota tersebut, tercatat 52,63% atau 10 kabupaten/kota sudah menyediakan menu TPAD dalam *website* resminya, dan sisanya 47.37% pemerintah daerah kabupaten/kota masih belum menyediakan menu TPAD dalam *website* resmi daerahnya, sedangkan sebelumnya sudah adanya peraturan yang diatur dalam Intruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ yang mengintruksikan untuk menyediakan menu Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) pada *website* resmi daerahnya.

Penelitian mengenai pengungkapan *Internet Financial Reporting* (IFR) merupakan topik yang menarik diteliti pada saat sekarang ini, dikarenakan masih adanya pemerintah daerah yang belum berpartisipasi untuk bertindak transparansi terhadap pengelolaan anggaran daerahnya, yang menyebabkan pihak yang membutuhkan informasi tidak dapat mengakses dan melakukan pengawasan terkait informasi-informasi keuangan daerah tersebut, yang diindikasikan dapat mendorong atau mengakibatkan terjadinya tindakan penyalahgunaan anggaran atau pemborosan dalam penggunaan sumber daya publik.

Pada Penelitian ini ada beberapa faktor yang mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan *Internet Financial Reporting* (IFR) yang pertama yaitu kekayaan daerah. Kekayaan Daerah merupakan gambaran yang menunjukkan tingkat kemakmuran dari daerah itu sendiri. Kekayaan daerah yang tinggi cenderung rentan untuk disalahgunakan. Keadaan ini mendorong masyarakat untuk bertindak sebagai prinsipal dan lebih antusias dalam memantau atau mengawasi kinerja pemerintah daerah agar tidak terjadinya penyalahgunaan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi tuntutan dari masyarakat dalam bertindak transparansi dengan biaya yang murah dan mudah dilihat adalah dengan melaporkan keuangan daerah tersebut melalui via internet.

Hasil Penelitian Jafaru dan Francis (2016) mengatakan bahwasanya terdapat hubungan yang positif antara kekayaan negara atau daerah dengan *Internet Financial Reporting* (IFR). Pendapat ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratama dkk (2015) dan Sofyani dan Dwirama (2019) yang menyatakan bahwa kekayaan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR). Hasil berbeda pada penelitian yang dilakukan oleh Hardianto dan Murtin (2020) yang menyatakan bahwa kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR).

Faktor yang mempengaruhi *Internet Financial Reporting* (IFR) berikutnya adalah belanja daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa belanja daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang dapat diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan

bersih. Belanja daerah digunakan untuk mendanai segala bentuk urusan di pemerintahan daerah.

Hasil penelitian Alhajriana (2017) menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap IFR, dimana tingginya belanja daerah, hal ini akan dapat dijadikan sebagai bukti bahwasanya pemerintah daerah telah menggunakan anggaran tersebut untuk kepentingan publik. Pendapat ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan Pratama dkk (2015), dan Masra (2020) yang menyatakan bahwasanya belanja daerah berpengaruh positif terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR). Hasil berbeda pada penelitian yang dilakukan oleh Rozi (2018), dan Azis (2020) yang menyatakan bahwasanya belanja daerah tidak berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR).

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Teori keagenan menjelaskan tentang dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan yaitu *principal* dan *agent*. Timbulnya hubungan keagenan jika saat satu orang atau lebih (*principal*) memerintah orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa dalam memberikan keputusan yang terbaik kepada *principal*. Pemerintah daerah dalam hal ini adalah selaku *agent*, dan selaku *principal* adalah masyarakat dan *stakeholder* lainnya. Masyarakat selaku *principal* memberikan amanat dan kepercayaan kepada pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahnya, agar bertindak transparansi dalam melaporkan hasil pelaksanaannya kepada masyarakat.

Hubungan keagenan dapat menimbulkan sebuah permasalahan yaitu salah satunya berupa asimetri informasi. Asimetri informasi diindikasikan dapat mendorong terjadinya penyelewangan dan tindakan korupsi yang dilakukan pemerintah (*agent*), dan permasalahan ini juga akan mengakibatkan terjadinya *agency cost* (biaya keagenan) yang akan ditanggung pemerintah dalam bertindak transparan (Wau, 2015).

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya asimetri informasi, yaitu pemerintah harus lebih meningkatkan transparansi dalam memberikan informasi kepada masyarakat, dan memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi, agar terjalinnya hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat, serta mengurangi konflik kepentingan. Salah satu bentuk kemudahan dalam mendapatkan informasi yaitu mempublikasikan laporan keuangan melalui internet atau website resmi pemerintah daerah

Teori Signalling

Teori *Signalling* merupakan teori yang menerangkan mengenai alasan pemerintah memiliki dorongan untuk menunjukkan signal kepada masyarakat. Memberikan sinyal positif kepada masyarakat mengenai pengungkapan laporan yang lebih berkualitas, dengan ini dapat meningkatkan sistem pengendalian internal dan pengungkapan yang lebih detail, yang bisa mengurangi terjadinya *asimetri information*, dan dapat memberikan dukungan masyarakat kepada pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dengan lebih baik.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, menjelaskan bahwa laporan keuangan yaitu laporan yang terstruktur tentang posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang akan dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas,

dan kinerja keuangan pada suatu entitas pelaporan yang berguna bagi para pihak yang berkepentingan untuk melihat beserta mengevaluasi keputusan dalam alokasi sumber daya.

Internet Financial Reporting (IFR)

Internet Financial Reporting (IFR) adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam melaporkan terkait dengan anggaran yang telah dikelolanya yang dilaporkan melalui internet. Penerapan *Internet Financial Reporting* (IFR) di pemda, ada beberapa keuntungan yang diperoleh. Pertama bagi pemerintah, dengan internet sebagai media pengungkapan laporan keuangan, hal ini dapat menghemat biaya bagi pemerintah tanpa perlu mencetak laporan keuangan. Kedua, bagi pihak yang berkepentingan lebih mudah melihat laporan keuangan pemerintah melalui internet dengan biaya yang murah, mudah dan cepat untuk melihatnya.

Pengungkapan Internet Financial Reporting (IFR)

Pengungkapan Internet Financial Reporting (IFR) merupakan aksesibilitas laporan keuangan terkait dengan kemudahan pengguna atau pihak yang berkepentingan dalam menemukan informasi keuangan yang disediakan melalui internet. Tujuan dari pengungkapan pada laporan keuangan yaitu untuk menyediakan informasi yang berguna dalam mencapai tujuan pelaporan keuangan dan juga untuk melayani berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Pengungkapan bertujuan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan bagi pengguna dan apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi dan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju.

Kekayaan Daerah

Kekayaan daerah merupakan tingkat kemakmuran dari suatu daerah yang membuktikan bahwasanya pemda mampu untuk mengelola sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya. Kekayaan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah yaitu penerimaan yang diperoleh dari suatu daerah yang berasal dari berbagai sumber ekonomi asli daerah, yaitu terdiri dari penerimaan dari setoran pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo, 2002).

Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan segala bentuk belanja yang ada di pemerintah baik dalam bentuk belanja langsung ataupun belanja tidak langsung yang mempengaruhi berkurangnya nilai kekayaan bersih di daerah tersebut. Belanja daerah dipergunakan untuk mendanai segala bentuk pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota.

Hubungan Kekayaan Daerah Terhadap Pengungkapan Internet Financial Reporting (IFR) Pada Pemerintah Daerah

Kekayaan daerah merupakan tingkat kemakmuran dari suatu daerah yang membuktikan bahwasanya pemerintah daerah mampu dalam mengelola sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya. Besarnya kekayaan daerah, dapat diindikasikan bahwa penyalahgunaan dan kecurangan sangat rentan terjadi, sehingga dengan hal ini mendorong masyarakat dalam bertindak antusias dalam melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kinerja pemerintah daerah dan menuntut pemerintah dalam bertindak transparansi terhadap pengelolaan keuangan di pemerintah daerah tersebut.

Besarnya kekayaan daerah, juga mendorong pemerintah untuk bertindak transparansi dengan menunjukkan kepada pihak yang terkait salah satunya masyarakat bahwasanya pemerintah tersebut telah mengelola kekayaan daerah tersebut dengan baik. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam memenuhi tuntutan transparansi dengan menghemat biaya, dan mudah dilihat oleh pihak yang berkepentingan yaitu dengan mengungkapkan laporan keuangan di daerah itu melalui internet (Pratama, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Syofyani dan Dwirama (2019) menyatakan bahwa kekayaan daerah adalah bentuk pembuktian bahwa kinerja pemerintah di daerah tersebut telah baik. Hasil penelitian Syofyani dan Dwirama (2019) juga membuktikan bahwa kekayaan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR) pada pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah yang memiliki kekayaan daerah yang besar, akan mendorong pemerintah tersebut dalam melakukan pengungkapan *Internet Financial Reporting* (IFR) pada website resmi di daerahnya sebagai bentuk pertanggungjawabannya dalam bertindak transparansi. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H1: Kekayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Internet Financial Reporting* (IFR)

Hubungan Belanja Daerah Terhadap Pengungkapan *Internet Financial Reporting* (IFR)

Belanja daerah didefinisikan sebagai segala bentuk kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih (Masra, 2020). Tingginya belanja daerah, dapat dijadikan sebagai bukti bahwasanya pemerintah daerah telah menggunakan anggaran tersebut untuk kepentingan publik, sehingga dapat diartikan bahwasanya semakin tinggi belanja daerah, maka semakin tinggi juga keinginan pemerintah dalam menyampaikan laporan keuangannya kepada publik khususnya melalui *website* pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2015) menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR), artinya belanja daerah menjadi faktor pendorong pemerintah daerah dalam melakukan pelaporan keuangan melalui internet karena semakin tinggi belanja daerah menunjukkan bahwa pemerintah telah memberikan pelayanan yang baik dan fasilitas yang berkualitas kepada masyarakat. Pendapat ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Masra (2020) dan Alhajjriana (2019) yang menunjukkan belanja daerah berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR). Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

H2: Belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Internet Financial Reporting* (IFR).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong kedalam penelitian kausalitas, yang menjelaskan hubungan yang bersifat sebab akibat. Pada penelitian ini, menjelaskan dan menggambarkan pengaruh kekayaan daerah dan belanja daerah terhadap pengungkapan *Internet Financial Reporting* (IFR) pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat.

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode sampel bertujuan (*purposive sampling*), yakni pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan dan kriteria-kriteria yang telah ditentukan, dengan jumlah sampel 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

Sumber data yang digunakan di penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Adapun data dalam

penelitian ini didapatkan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan *website* resmi pada masing-masing pemda di Provinsi Sumatera Barat.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Dependen (Y)

Pengungkapan IFR adalah variabel dependen dalam penelitian ini. Pengungkapan IFR ialah akseibilitas laporan keuangan yang terkait dengan kemudahan pengguna dalam memperoleh data laporan keuangan yang disediakan pada internet atau *website* resmi pemerintah daerah.

$$\text{Pengungkapan IFR} = \text{ketersediaan informasi LAKIP} + \text{jumlah pengungkapan informasi keuangan}$$

Variabel Independen

Kekayaan Daerah

Kekayaan daerah merupakan tingkat kemakmuran dari suatu daerah yang membuktikan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya milik daerah yang berkaitan dan pendapatan lain yang sah dari daerah tersebut. Menurut Sofyani dan Dwirama (2019) kekayaan daerah dapat diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kekayaan Daerah} = \text{Total Pendapatan Asli Daerah (PAD)}$$

Belanja Daerah

Belanja daerah yaitu semua realisasi pengeluaran pada pemda yang digunakan untuk belanja langsung dan tidak langsung yang dapat mengurangi nilai kekayaan bersih. Menurut Masra (2020) belanja daerah diukur dengan rumus berikut:

$$\text{Belanja daerah} = \text{Ln total belanja daerah}$$

Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini analisis data yang digunakan yaitu analisis linear berganda. Analisis ini digunakan untuk menunjukkan bagaimana arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah berhubungan positif atau negatif serta mengalami kenaikan atau penurunan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
IFR	57	0	8	1,86	1,630
Kekayaan Daerah	57	24,20	27,03	25,1745	,56875
Belanja Daerah	57	26,89	28,49	27,5377	,35165
Valid N (listwise)	57				

Berdasarkan Tabel 1, nilai rata-rata (*mean*) pengungkapan IFR adalah sebesar 1,86 dengan standar deviasi sebesar 1,630. Nilai maksimum dan minimum pengungkapan IFR adalah 8 dan 0. Variabel kekayaan daerah memiliki rata-rata sebesar 25,1745 dan standar deviasi 0,56875. Nilai maksimum dan minimum variabel kekayaan daerah adalah sebesar 27,03 dan 24,20. Variabel belanja daerah memiliki rata-rata sebesar 27,5377 dan standar

deviasi sebesar 0,35165. Nilai maksimum dan minimum pada variabel belanja daerah adalah sebesar 28,49 dan 26,89. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini beragam dan bervariasi, yang mana hal ini disebabkan karena standar deviasi pada semua variabel besar dari 0.

Tabel 2
Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	33,705	17,595		1,916	,061
1 Kekayaan Daerah	1,111	,599	,388	1,855	,069
Belanja Daerah	-2,172	,968	-,468	-2,243	,029

Dari hasil pengolahan data SPSS diatas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 33,705 + 1,111X_1 - 2,172X_2$$

Keterangan :

Y = Pengungkapan IFR

X₁ = Kekayaan daerah

X₂ = Belanja daerah

Tabel 3
Uji Simultan

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	12,748	2	6,374	2,528	,089 ^b
Residual	136,130	54	2,521		
Total	148,877	56			

Pada hasil olahan output pada Tabel 3 didapatkan nilai Sig. sebesar 0,089, nilai tersebut lebih besar dari alfa sebesar 0,05 dan nilai F_{hitung} 2,528 < F_{tabel} adalah 3,16, maka dapat dikatakan bahwa variabel independen yaitu kekayaan daerah dan belanja daerah tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen yaitu pengungkapan IFR secara bersamaan.

Tabel 4
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,293 ^a	,086	,052	1,588

a. Predictors: (Constant), Belanja Daerah, Kekayaan Daerah
b. Dependent Variable: IFR

Pada hasil tampilan output Tabel 4 nilai *Adjusted R Square* adalah 0,052 atau 5,2%. Hal ini mengidentifikasi bahwa 5,2% variabel kekayaan daerah dan belanja daerah dapat memberikan pengaruh terhadap pengungkapan IFR, sedangkan 94,8% dipengaruhi oleh variabel bebas lain diluar variabel yang ada didalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh kekayaan daerah terhadap pengungkapan *Internet Financial Reporting* (IFR)

Hasil temuan uji t (parsial) pada variabel kekayaan daerah menunjukkan bahwa nilai signifikan $0,069 > 0,05$ dengan koefisien 1,111. Hal ini dapat disimpulkan secara parsial bahwa variabel kekayaan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Internet Financial Reporting* (IFR). Hal ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama ditolak

Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintahan daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 sampai tahun 2020 yang memiliki kekayaan daerah yang besar, belum bisa dijadikan sebagai acuan dalam membuktikan bahwa pemerintah daerah tersebut telah bertindak transparansi dalam mengungkapkan laporan keuangan didaerahnya melalui internet. Hasil penelitian ini senada dengan penelitian yang dilakukan Hardianto dan Murtin (2020) yang menemukan bahwa kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan IFR, hal tersebut dikarenakan kurang efisiennya dalam pengelolaan kekayaan daerah yang dimiliki pemda, sehingga pemerintah daerah tidak mampu dalam meningkatkan transparansi dan memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Penelitian berbeda dilakukan oleh Jafaru dan Francis (2016), Pratama dkk (2015), Syofyani dan Dwirama (2019) yang membuktikan bahwa kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan IFR, dimana semakin tinggi kekayaan daerah, maka semakin tinggi juga keinginan masyarakat dalam mengungkapkan laporan keuangan daerahnya melalui internet. Hal ini dikarenakan pemerintah akan memberikan bukti nyata kepada masyarakat atas kinerjanya baiknya dalam mengelola keuangan di pemerintah daerahnya.

Pengaruh belanja daerah terhadap pengungkapan *Internet Financial Reporting* (IFR)

Berdasarkan hasil analisis statistik yang dilihat dari hasil pengujian secara parsial menunjukkan tingkat signifikan sebesar $0,029 < 0,05$ dengan nilai koefisien -2,172 maka dapat disimpulkan bahwa belanja daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan *Internet Financial Reporting* (IFR). Hal ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini diterima

Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintahan daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 sampai tahun 2020 yang memiliki belanja daerah yang semakin rendah, maka pengungkapan IFR pada pemerintah daerah semakin tinggi, dan sebaliknya semakin tingginya belanja daerah, maka semakin rendah pengungkapan IFR pada pemerintah daerahnya. Ini berarti bahwa daerah dengan nilai belanja untuk setiap penduduk yang cukup besar memiliki kecenderungan pengungkapan informasi keuangan di internet pada level kualitas yang rendah (Purwanti dkk, 2017).

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwanti dkk (2017) dan Diptyana (2019) yang juga menemukan bahwa belanja daerah berpengaruh negatif terhadap pengungkapan IFR. Hal ini diindikasikan terjadi karena pemerintah daerah lebih berfokus untuk memberikan pelayanan yang bersifat langsung yang dapat dirasakan oleh penduduk, dari pada mendanai layanan informasi keuangan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Alhajriana (2017), Pratama dkk (2015), dan Masra (2020) yang menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Internet Financial Reporting* (IFR) dimana semakin tinggi belanja daerah, maka keinginan pemerintah untuk mengungkapkan IFR di pemerintah daerahnya juga semakin tinggi, karena pemerintah daerah yang mempunyai belanja daerah yang tinggi akan melihat dan memberikan bukti bahwa mereka telah menggunakan anggaran belanja untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil dari temuan penelitian yang telah dilakukan melalui tahap pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kekayaan daerah dalam pengujian hipotesis tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Internet Financial Reporting* (IFR) pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.
2. Belanja daerah dalam pengujian hipotesis berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Internet Financial Reporting* (IFR) pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah dirancang dengan sebaik-baiknya, namun penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu :

1. Masih rendahnya kemampuan dari variabel independen dalam penelitian, sehingga variabel dependen belum dapat dijelaskan secara luas oleh variabel independen.
2. Masih rendahnya nilai Adjusted R² sebesar 5,2%, hal ini menunjukkan masih banyak variabel lain yang memiliki kontribusi besar dalam mempengaruhi pengungkapan *Internet Financial Reporting* (IFR).

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah diuraikan, maka peneliti dapat mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan mempertimbangkan variabel lainnya yang dianggap mampu untuk mempengaruhi pengungkapan *Internet Financial Reporting* (IFR).
2. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah atau memperluas sampel penelitian dan menambah periode penelitian dengan tahun yang lebih lama. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu menjelaskan signifikansi dari variabel-variabel yang hasilnya tidak signifikan pada penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- Alhajjriana, G. I., Nor, W., & Wijaya, R. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Internet Financial Reporting* (IFR) Pemerintah Daerah dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 17(2), 100-109.
- Azis, I., & Hapsari, D.W. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah terhadap *Internet Financial Reporting*. *E-Proceeding of Management*, 7(2).
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IB, SPSS 23. Edisi 8*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardianto, D., & Murtin, A. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan *Internet Financial Reporting* (IFR) di Indonesia. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 4(2), 33-45.
- Hendrik, W., Zaitul, Z., & Novia, R. (2020). *Internet Financial Reporting* dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi pada Pemerintah Kota dan Kabupaten di Sumatera Tengah.
- Heri. 2015. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: CAPS.

- Intruksi Mendagri No. 188.52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah.*
- Intruksi Mendagri No. 188.52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah.*
- Jafaru, J., & Francis, O.A. (2016) *Voluntary Internet Financial Reporting (IFR) in The Nigerian Public Sector. Journal of Accounting, Vol. 2.*
- Jawder, N.A., & Sarea, A. (2016). Determinations of Internet Financial Reporting: Evidence from Bahrain Bourse. *Jordan Journal of Business Administration, Vol 12(4).*
- Kasmir. 2014. *Analisis Laporan Keuangan.* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Kurniawan, C.H., & Scorpiani, L.N.K. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketersediaan dan Ketraksesan *Internet Financial Reporting* Oleh Pemerintah Daerah di Indonesia. *MODUS 31(2)*, 184- 206.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntabilitas Sektor Publik.* Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Masra, E. A., & Sari, V, F. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Internet Financial Reporting (IFR)* Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. *Jurnal Ekplorasi Akuntansi*, 2(2), 2757-2772.
- Mokhtar. E, S. (2017). *Internet Financial Reporting (IFR) Determinants: A Meta- Analytic Review. Journal of Financial Reporting and Accounting, Vol 15(1), 116-154.*
- Nosihana, A., & Yaya, R. (2016). *Internet Financial Reporting (IFR)* dan Faktor- Faktor yang Mempengaruhinya pada Pemerintah Kota dan Kabupaten di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntanis dan Bisnis*, 3(2), 89-104.
- Nufus, S, R, H., Herwanti, T., & Santoso B. (2019). Pengaruh Ukuran Pemda, *Ukuran pemerintah daerah*, dan Kinerja Keuangan terhadap IFR pada Pemda dengan Dimoderasi Opini Audit. *Jurnal Akuntansi*, 29(3), 1012-1025.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Pratama, K. A. D., Werastuti, D. N. S., & Sujana, E. (2015). Pengaruh kompleksitas pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, kekayaan daerah, dan belanja daerah terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi*, 3(1).
- Purwanti, R. E., Akram & Supratman, L. (2017). The Determinants Transparency and Accessibility of Internet Financial Reporting on Local Government in Indonesia. *STIE Mandala International Conference and Call for Paper, Jember.*
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.*
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.*
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah.*
- Rozi, F. (2018). Determinan Pengungkapan Informasi Keuangan dalam Website Pemerintah Daerah. *Artikel.*
- Sartono, A. 2013. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi.* Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi.* Bandung. Alfabeta.
- Sofyani, H., & Dwirama, V. (2019). Determinan Praktik Internet Financial Reporting Oleh Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi 17(2)*, 158-168.

- Verawaty. (2015). Determinan Akseibilitas Internet Financial Reporting (IFR) Melalui E-Government Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 92-107.
- Wau, I., & Ratmono, R. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketersediaan dan Keteraksesan *Internet Financial Reporting*. *Diponegoro Journal of Accounting* 4(4), 187-198